

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Prosedur penggunaan Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Fungsi adanya Laporan Hasil Analisis PPATK adalah dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang sekaligus mengungkap tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang atau dua kejahatan sekaligus. Kekuatan Pembuktian dari LHA PPATK dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disimpulkan bahwa LHA berfungsi sebagai informasi intelijen untuk ditindaklanjuti dan bukan merupakan alat bukti yang sah dihadirkan didalam persidangan. Jika dilihat dari fungsi dan keberadaan LHA, harus diakui bahwa LHA PPATK mempunyai fungsi yang sangat besar dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika keberadaan LHA dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberikan ketentuan atau pengaturan tambahan terkait LHA PPATK sehingga keberadaan dan fungsi LHA PPATK terlihat jelas dan nampak sebagai sesuatu yang memiliki fungsi penting dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil kerja PPATK. Berdasarkan pengalaman penulis yang telah lama berkecimpung dalam dunia penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan, keberadaan LHA sangatlah membantu dalam tahap pembuktian suatu tindak pidana terlebih tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu sudah selayaknya LHA dapat dijadikan alat bukti yang seutuhnya karena di dalamnya terdapat informasi-informasi penting yang dapat mengungkap suatu tindak pidana sebagaimana layaknya alat bukti.

Kata Kunci : Laporan Hasil Analisis, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The type of research in this thesis is juridical normative (legal research), using a statutory approach (statue approach), and conceptual approach (conceptual approach). The problems in this thesis are: The Function of Analysis Report (LHA) Reporting Center and Analysis Transaction Center (PPATK) in disclosure of money laundering crimes. Procedure used an Analysis Reports (LHA) Reporting Center and Analysis of Financial Transactions (PPATK) in disclosure of money laundering crimes.

The function of Analysis Report (PPATK) is can help law enforcement apparatus in uncovering money laundering crimes as well as exposing criminal acts originating from money laundering or two crimes at once. Strength of Proof of LHA PPATK in Proving Money Laundering can be concluded that the LHA serves as intelligence information to be followed up and is not valid evidence presented at the trial. If seen from the function and existence of LHA, it must be recognized that LHA PPATK has a very large function in disclosing money laundering. Therefore, it is not excessive if the existence of LHA in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering is given additional provisions or arrangements related to LHA PPATK so that the existence and function of LHA PPATK is clearly visible and appears as something that has important functions in disclosure of money laundering crimes that are the work of PPATK. Based on the experience of the author who has long been in the world of law enforcement, especially in the field of prosecution, the existence of LHA is very helpful in disclosure a crime especially money laundering. Therefore, it is appropriate that the LHA can be used as evidence as a whole because in it there is important information that can reveal a criminal act as befits the evidence.

Keyword: Analysis Report, Money Laundering Crime

MOTTO

Memulai Dengan Penuh Keyakinan

Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan

Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul FUNGSI LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H.,MH. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Radian Salman, S.H., LL.M.selaku Wakil Dekan III;
3. Prof. Dr Prof. Dr. Agus Yudha Herenoko, S.H., M.H. selaku ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, Dosen MKPT I dan penguji Tesis;
5. Bapak Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen MKPT II dan penguji Tesis;
6. Bapak Riza Alfianto, S.H.,MTCP selaku dosen penguji Tesis;
7. Bapak Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M selaku penguji Tesis;

8. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Keluarga Besarku, Orang tua, Istri tercinta Nooritza Meidahnia, dan anak tercinta Dhairya Adhiyastha Atmadi, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan motivasi kepada penulis;
10. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terimakasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;
11. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Perak, terimakasih atas motifasi dan semua bantuannya kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Januari 2020

Dimaz Atmadi Brata Anandiasyah, S.H.
NIM. 031714153070

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya UU No. Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, TLN Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.